



Menyoal Industri Sawit Berkelanjutan

Topik diskriminasi EUDR terhadap minyak sawit mengemuka pada sesi *roundtable discussion* yang digelar IPOSS, IBC dan GASP di sela pertemuan IES 2025. Aturan yang mengharuskan produk kelapa sawit yang diekspor ke Uni Eropa memenuhi standar bebas deforestasi berpotensi menghambat akses pasar bagi petani kecil. Duta Besar Yuri O. Thamrin pada kesempatan itu menyatakan aturan Uni Eropa semestinya bersikap adil dan tidak membawa nuansa “imperialisme regulasi”. Isu lingkungan dan keberlanjutan diklaim pihak benua biru sebagai alasan EUDR diterapkan. Apakah industri sawit Indonesia memang belum berkelanjutan?

*Selengkapnya di halaman 3



Suasana acara *roundtable discussion* yang diselenggarakan oleh IPOSS, IBC, dan GASP di sela pertemuan IES 2025 (dok. IBC)

Dana PSR Sudah Dinaikkan, Masalah Selesai?

Belum semua lahan kelapa sawit tua dan tidak produktif masuk dalam program PSR. Padahal pemerintah telah menyediakan dana bantuan PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang cukup besar. Dana bantuan program PSR ini sudah dua kali dinaikkan pemerintah. Dari 25 juta menjadi 30 juta rupiah pada tahun 2020, dan baru-baru ini dari 30 juta ke 60 juta rupiah. Tetapi pada perkembangannya ternyata tidak terdapat korelasi yang signifikan antara peningkatan dana bantuan PSR dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta per hektare terhadap capaian PSR. Lantas, sebenarnya di mana letak lambannya capaian PSR?

*Selengkapnya di halaman 5

Strategi Meningkatkan Likuiditas Bursa CPO Indonesia

Sebagai produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia, Indonesia berpeluang menjadi referensi harga CPO global. Namun, kenyataannya, dalam penetapan harga referensi CPO, Kementerian Perdagangan masih mempertimbangkan harga dari bursa internasional seperti *Bursa Malaysia Derivatives* (BMD) dan Rotterdam. Ketergantungan ini tak terelakkan mengingat dinamika pasar luar negeri masih sangat mempengaruhi dinamika harga di dalam negeri karena rantai pasok yang terhubung antara pasar Eropa (Rotterdam) dan Malaysia dengan Indonesia. Dibutuhkan dukungan regulasi. Indonesia tidak hanya akan menjadi produsen CPO terbesar di dunia tetapi juga memiliki kendali lebih besar atas harga CPO domestik.

*Selengkapnya di halaman 11



Dr. Sofyan A. Djalil

Editorial

Perkembangan industri sawit Indonesia kian dinamis. Termasuk dalam hal tantangan yang dihadapinya. Beberapa masalah baru mencuat seiring gejolak politik dan perdagangan dunia. Jeli dalam menetapkan strategi dan kebijakan yang tepat semakin menjadi keharusan agar komoditas ini tak lekang gempuran zaman. Selamat membaca IPOSS News Edisi Kesembilan!

Kualitas Tanah Terawat, Produktivitas Sawit Moncer

Untuk mendapatkan hasil panen sawit yang optimal, menurut Prof. Supiandi Sabiham, kualitas tanah sebagai media tumbuh perlu mendapatkan perhatian khusus. Tanah yang tidak terjaga keseimbangannya dapat menghambat produktivitas dan mengurangi hasil panen.

“Tanah yang ditanami tumbuhan yang dipanen akan terus mengalami penurunan kualitas. Tanaman apapun. Bukan cuma sawit,” tegas Guru Besar Ilmu Tanah IPB itu dalam sebuah wawancara di Bogor (27/2).

Prof. Supiandi membantah tuduhan bahwa kelapa sawit adalah biang kerusakan tanah. Ia menjelaskan kualitas tanah pasti akan semakin menurun seiring waktu karena unsur hara yang terkandung di dalamnya terus diserap oleh tanaman dalam mendukung pertumbuhannya.

Tanaman kelapa sawit, misalnya, membutuhkan berbagai unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah yang optimal. Unsur-unsur ini diambil dari tanah melalui akar, lalu digunakan dalam berbagai proses fisiologis seperti fotosintesis, pembentukan jaringan, dan produksi buah.

Setiap kali tandan buah segar dipanen, sebagian besar unsur hara yang telah terserap juga ikut terangkut keluar dari lahan. Jika tidak ada pengembalian unsur hara melalui pemupukan atau penambahan bahan organik, tanah akan kehilangan keseimbangan nutrisinya secara bertahap.

“Pemberian pupuk itu bukan sekadar banyaknya, tetapi tergantung kebutuhan tanahnya itu sendiri. Maka yang terpenting di sini adalah keseimbangan. Unsur-unsur yang diperlukan tanah yang jenisnya ada 12 unsur itu harus terjaga agar tetap seimbang,” jelas Prof. Supiandi.

Untuk dapat menentukan dosis pupuk yang tepat, diperlukan pemantauan kualitas tanah secara berkala oleh seorang ahli tanah. Di perkebunan negara dan swasta riset tanah senantiasa dilakukan oleh tim *Research & Development* (R&D). Yang menjadi soal adalah para petani sawit yang menguasai 42% perkebunan sawit di Indonesia tidak memiliki kapasitas riset semacam itu.

Bantuan dalam bentuk edukasi, teknologi, dan dukungan finansial sangat diperlukan agar para petani sawit dapat mengelola lahannya secara berkelanjutan. Penyuluhan dan pelatihan mengenai manajemen tanah, termasuk cara melakukan analisis tanah, mengenali gejala defisiensi unsur hara, serta teknik pemupukan yang tepat sangat diperlukan.

Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat membantu petani dalam memantau kualitas tanah. Penggunaan alat uji tanah sederhana hingga sistem berbasis digital memungkinkan petani mengetahui kondisi unsur hara dan pH tanah dengan lebih akurat. Dengan informasi tersebut, mereka dapat menyesuaikan jenis dan dosis pupuk yang diperlukan tanpa harus menerapkan metode coba-coba yang kurang efisien. (AM)



Ilustrasi lahan dan bibit kelapa sawit (dok.SMART)

Menyoal Industri Sawit Berkelanjutan



Duta besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Denis Chaibi menyampaikan pendapatnya saat acara *Palm Oil Roundtable Discussion* (dok.IBC)

Topik tentang hambatan *European Union Deforestation Regulation* (EUDR) menjadi salah satu yang mengemuka pada diskusi meja bundar yang digelar *Indonesia Palm Oil Strategic Studies* (IPOSS), *Indonesian Business Council* (IBC) dan *Global Alliance for a Sustainable Planet* (GASP) pada 18 Februari di Hotel Shangri-La di sela-sela pertemuan IES 2025. Indonesia diharapkan menjadi negara terdepan dalam industri kelapa sawit yang berkesinambungan.

Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran strategis dalam rantai pasok global. Namun di saat bersamaan industri sawit juga kerap menghadapi tantangan keberlanjutan. Penerapan standar global yang terus berkembang seperti Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) yang akan diberlakukan tahun 2026 dianggap sebagai salah satu hambatan utama bagi negara-negara penghasil minyak sawit.

Aturan yang mengharuskan produk kelapa sawit yang diekspor ke Uni Eropa memenuhi standar bebas deforestasi berpotensi menghambat akses pasar bagi petani kecil yang kesulitan memenuhi persyaratan tersebut. Sebagaimana diketahui, 40% luas perkebunan sawit Indonesia dimiliki dan dikelola oleh *smallholders* yang memegang peranan penting dalam peningkatan produksi sawit ke depan terutama melalui penguatan produktivitas. Diperlukan upaya bersama dari para pemangku kepentingan untuk mengawal kesiapan *smallholders* menghadapi EUDR baik dari sisi kebijakan tata kelola, regulasi, teknologi, data serta dukungan keuangan.

Duta Besar Yuri O. Thamrin yang menjadi salah satu pembicara utama pada diskusi tersebut mengungkapkan bahwa Uni Eropa dengan regulasinya tidak semestinya bersikap tidak adil terhadap negara-negara penghasil minyak sawit, apalagi membawa nuansa “imperialisme regulasi”. Diperlukan pemahaman bersama serta pendekatan kebijakan yang lebih seimbang dan kooperatif—baik di tingkat Komisi Eropa

maupun di Indonesia—untuk memastikan produk minyak sawit Indonesia tetap kompetitif di pasar global, termasuk di Uni Eropa.

Bila ditelusuri lebih lanjut minyak sawit memang bukanlah penyebab deforestasi. Karena faktanya, deforestasi telah terjadi jauh sebelum booming industri kelapa sawit di pasar internasional. Deforestasi di Indonesia terjadi akibat kebijakan konsesi hutan pada era 1970-an serta kebijakan lain yang kurang tepat, termasuk pembukaan hutan untuk berbagai keperluan. Alih-alih deforestasi, industri kelapa sawit justru memberikan kontribusi besar dalam menyelamatkan lahan-lahan terdegradasi akibat praktik kehutanan yang tidak sesuai standar dengan mengalihkannya menjadi lahan produktif.

Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam yang turut menghadiri diskusi menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan hubungan dagang yang baik dengan Indonesia, EU akan senantiasa mendengarkan aspirasi dari negara-negara mitranya. Denis juga mengatakan bahwa penundaan implementasi EUDR memberikan kesempatan kepada mitra EU termasuk Indonesia agar dapat memiliki waktu lebih untuk menyesuaikan diri. Ia mengajak para mitra dagang EU untuk selalu mengikuti tuntutan perdagangan global yang begitu dinamis.

Dengan modal yang ada, potensi terbuka lebar bagi Indonesia untuk memimpin penerapan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan menyelaraskan peran industri sawit bagi kepentingan perekonomian ekonomi nasional dengan terpeliharanya kelestarian lingkungan. Upaya demi upaya itu dapat mengantarkan Indonesia menjadi pemimpin yang kompetitif dan bertanggung jawab dalam industri kelapa sawit global. (AM)

Perusahaan Jepang Luncurkan Oli Mesin Balap dari Sawit



Presiden Prabowo Subianto dengan Sekjen PBB Antonio Guterres (dok. presidenri.go.id)

Kegunaan minyak sawit semakin hari semakin tak terbendung. Kalau minyak sawit selama ini hanya dipersepsikan sebagai bahan minyak goreng dan campuran biodiesel, kini justru bagus dijadikan salah satu komponen minyak pelumas yang digunakan pada mesin mobil balap.

Adalah Idemitsu Kosan, perusahaan yang berbasis di Tokyo, yang melakukan penemuan tersebut sehingga kemudian menamakan oli mesin dari sawit itu: Idemitsu IFG Plantech Racing. Sebagaimana dilansir oleh Kompas yang mengutip dari Happy Eco News (28/02/25), oli pelumas dimaksud terbuat dari 80% bahan berbasis tanaman dan dinyatakan telah memenuhi standar pelumas mesin terbaru dari American Petroleum Institute.

Konon kabarnya, oli mesin ini menggunakan minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai bahan dasarnya, ditambah ester dari minyak lobak dan minyak bunga matahari. Komposisi itu membuat jejak karbon Idemitsu IFG Plantech 82% lebih rendah daripada oli konvensional. Angka itu didapat berdasarkan perkiraan dari Japan LP Gas Association yang memperhitungkan seluruh siklus hidup produk mulai dari produksi hingga pembuangan.

Oli motor yang ditemukan dari hasil ramuan ramah lingkungan tersebut, diluar dugaan ternyata sangat handal bagi performa mesin dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan hasil ujicoba yang dilakukan oleh Idemitsu, oli dari sawit menunjukkan ketangguhan 194% lebih tinggi dibandingkan

oli-oli premium lainnya, gesekan 50% lebih rendah, 169% lebih baik untuk komponen mesin, serta 124% piston lebih bersih. Ini berarti oli membantu mesin bekerja dengan lancar dan efisien serta mampu menekan keausan pada komponen penting kendaraan.

“Teknologi kami memadukan inovasi dan tanggung jawab lingkungan terbaik,” kata perwakilan dari Idemitsu. Lebih lanjut, peluncuran awal Idemitsu IFG Plantech Racing ditargetkan kepada pelanggan di Thailand, Australia, Singapura, dan Malaysia melalui toko daring perusahaan. Rencana untuk memperluas ketersediaan ke Amerika Serikat, Brasil, Meksiko, UEA, Tiongkok, India, dan kawasan lain sudah berjalan.

Di Indonesia, cerita tentang pemanfaatan hasil hilirisasi sawit sebagai sumber energi sudah dirancang sejak lama. Namun baru pada Februari 2023, diberlakukan mandatori B35 yaitu biodiesel dengan campuran 35% FAME ke dalam bahan solar, lalu pada awal 2025 ini menjadi B40.

Adapun minyak kelapa sawit mentah (CPO) diujicoba sebagai bahan bakar campuran avtur di Indonesia sejak tahun 2021. Pada 27 Oktober 2023, Indonesia berhasil melakukan penerbangan komersial pertama menggunakan bahan bakar nabati atau Bioavtur. Sedangkan minyak sawit mulai dipakai sebagai bahan minyak goreng sudah dimulai pada tahun 1990-an. (AM)

Intercropping : Strategi Cerdas Menjaga Pendapatan Pekebun Selama Masa Replanting Sawit



Padi Gogo yang ditanam di lahan kering (dok. Distan Buleleng)

Produktivitas kebun sawit rakyat masih jauh lebih rendah dibandingkan perkebunan besar. Data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa rata-rata produktivitas sawit rakyat hanya mencapai 3,3 ton CPO per hektar per tahun, sedangkan perkebunan besar mencapai 4,7 ton. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh penggunaan bibit *illegitimate*, praktik budidaya yang belum sesuai *Good Agricultural Practices (GAP)*, serta keterbatasan akses pupuk dan pestisida. Selain itu, juga banyaknya tanaman tua yang melewati usia produktif tetapi belum diremajakan menjadi faktor utama. Di sisi lain, produktivitas sawit diyakini akan meningkat jika tanaman berhasil diremajakan melalui program PSR. Akan tetapi, ada *dilemma* bagi petani, akankah mereka tetap dapat berpenghasilan jika tanaman sawitnya diremajakan?

Peremajaan atau *replanting* menjadi langkah penting untuk meningkatkan produktivitas sawit. Peremajaan tersebut dimulai dari aktivitas *land clearing*, penanaman dan perawatan selama tanaman belum menghasilkan (TBM) hingga berumur 30 - 36 bulan atau 2,5 - 3 tahun. Tentunya, selama proses itu pekebun akan kehilangan produksi dan pendapatan usaha dari kebun sawit. Sekitar Rp 30 juta per hektar per tahun pendapatan dari kebun sawit akan hilang. Tentunya, kondisi ini membuat banyak petani ragu untuk mengikuti program PSR, mengingat hasil dari sawit telah menjadi sumber utama penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah *intercropping*, yakni menanam tanaman sela yang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek hingga menengah. Dengan hasil panen dari tanaman sela tersebut, diharapkan petani akan memiliki pendapatan baru. Mengingat manfaatnya, sebagian petani telah mencoba menerapkan sistem *intercropping* pada kebun sawitnya di masa TBM, seperti tanaman padi gogo, jagung, kedelai, talas, melon, pisang, nenas, dan

Tanaman Sela	Potensi Produktivitas (per siklus tanam)	Lama Masa Panen	Estimasi Pendapatan	Referensi
Padi gogo (Banten)	4,2 ton/ha	3-4 bulan	Rp 27 juta per ha per siklus tanam	Kementan (2025)
Jagung (Riau)	6.36 ton/ha	3-4 bulan	Rp 5.75 juta per ha per siklus tanam	Radar (2021)
Kedelai (Riau)	1.69 ton/ha	3 bulan	Rp 0.89 juta per ha per siklus tanam	Radar (2021)
Talas (Kalbar)	0.13 ton/ha		0.58 juta per ha per siklus tanam	Oktariana, dkk (2024)
Cabe rawit (Kalbar)	600 kg/ha		Rp 24 juta per ha per siklus tanam	Oktariana, dkk (2024)
Pisang (Sumut)	-	TBM = 6 kali panen	Rp 13.27 juta per ha selama masa TBM	Batubara (2022)
Nanas (Lampung)	-	10-12 bulan	Sampai dengan Rp10,7 juta per tahun	Hasibuan (2017)
Semangka (Bengkulu)	3.0-3.7 ton/ha	4 bulan	Rp 3.3 juta per ha per siklus tanam	Erdiansyah (2024)

semangka. Masing-masing tanaman sela tersebut ternyata dapat menjadi alternatif bagi petani untuk memperoleh pendapatan usaha selama masa TBM.

Hal ini telah diungkapkan oleh sejumlah penelitian dan pengamatan yang dilakukan pada tanaman sela di kebun sawit.

Walaupun, dari penelitian dan pengamatan tersebut tidak menjelaskan dampak tanaman sela terhadap kelapa sawit, namun setidaknya informasi tersebut dapat memberikan gambaran awal bahwa menanam *intercropping* di kebun sawit pada masa TBM dapat memberikan pendapatan usaha tambahan bagi petani sawit, di saat tanaman utamanya belum menghasilkan.

Memang perlu dicatat bahwa apabila penanaman tanaman sela dilakukan dengan cara yang tepat yang sejalan dengan kultur teknis kelapa sawit, maka diharapkan berdampak positif bagi perkembangan sawit seperti memperbaiki kesuburan tanah dengan meningkatkan bahan organik dan menambah mikroba tanah, menekan perkembangan gulma, mengurangi erosi, dan terutama mengoptimasi pemanfaatan lahan itu sendiri.

Oleh sebab itu, *intercropping* yang tepat perlu diimplementasikan oleh petani sawit secara lebih luas, khususnya bagi peserta program PSR yang telah diwajibkan oleh Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 5 Tahun 2025 untuk menanam padi gogo. Tentunya apabila telah diketahui kultur teknis yang tepat maka program ini layak didukung karena selain dapat memberikan tambahan pendapatan usaha juga merupakan bagian dari upaya petani mendukung program ketahanan pangan nasional. (DS)

Era Baru Digitalisasi Sawit 2025: Transformasi Industri dengan Teknologi



Industri kelapa sawit memasuki era baru dengan transformasi digital yang semakin pesat. Pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan sektor ini. Tahun 2025 menandai berbagai inovasi yang mengubah cara industri sawit beroperasi, mulai dari pengelolaan perkebunan hingga kemitraan industri.

Aplikasi AKSI NYATA BPDP: Digitalisasi Kemitraan Sawit

Pada 25 Februari 2025, BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) meluncurkan aplikasi AKSI NYATA untuk memperkuat kemitraan antara petani, produsen, dan UMKM. Aplikasi ini mempermudah komunikasi, transaksi bisnis, serta distribusi informasi terkait perkembangan industri sawit, sehingga petani dan pelaku usaha dapat terhubung lebih efisien dengan rantai pasok global.

Digital Twin: Pemantauan Perkebunan Real-Time

Meskipun konsep Digital Twin telah dikenal di berbagai industri selama bertahun-tahun, penerapannya dalam perkebunan kelapa sawit semakin mendapatkan perhatian pada tahun 2025. Dalam forum ICOPE 2025, Rémi Vézy, peneliti dari CIRAD, menyoroti manfaat teknologi ini jika diadopsi oleh perusahaan perkebunan. Digital Twin memungkinkan pemantauan kondisi lahan dan kesehatan tanaman secara real-time dengan mengintegrasikan data dari sensor tanah, cuaca, dan kesehatan tanaman, sehingga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan lahan, optimasi pemupukan, deteksi dini hama, serta perencanaan produksi berbasis data.

Galaxy XCover7 & Tab Active5: Perangkat Tangguh untuk Sawit

Untuk mendukung operasional lapangan, Samsung Business Indonesia memperkenalkan Galaxy XCover7 dan Tab Active5 pada 12 Februari 2025. Perangkat ini memiliki standar militer MIL-STD-810H yang dirancang untuk bertahan dalam kondisi ekstrem perkebunan sawit. Fitur seperti NFC, Push to Talk, dan GPS Tracking yang membantu pekerja lapangan dalam pencatatan data serta komunikasi yang lebih cepat dan akurat.

DJI Agras: Drone Generasi Baru untuk Sawit

Pemanfaatan *drone* di perkebunan sawit semakin berkembang, dan DJI Agras, *drone* pertanian dari perusahaan teknologi asal China, menghadirkan inovasi baru dengan peningkatan efisiensi dan akurasi. Dibandingkan model sebelumnya, seri terbaru DJI Agras dilengkapi dengan teknologi *AI-powered Precision Spraying*, yang dapat mengidentifikasi jenis tanaman dan menyesuaikan jumlah pupuk atau pestisida yang disemprotkan secara otomatis, mengurangi limbah dan biaya operasional. *Drone* ini juga memiliki kapasitas tangki yang lebih besar, waktu terbang lebih lama, serta sensor lidar untuk pemetaan lahan yang lebih akurat, sehingga membantu perusahaan perkebunan sawit meningkatkan produktivitas.

INSTIPER: Digitalisasi SDM Sawit

Dalam mendukung transformasi digital di industri sawit, INSTIPER (Institut Pertanian Stiper), institusi pendidikan tinggi yang berfokus pada agribisnis dan perkebunan di Indonesia, terus berinovasi dengan program digitalisasi pendidikan. Penghargaan yang diterimanya dalam Sawit Indonesia Award 2024 menunjukkan komitmen dalam melatih tenaga kerja sawit berbasis teknologi. Dengan adanya materi pendidikan berbasis digital, perusahaan kini dapat merekrut tenaga kerja yang lebih siap menghadapi era otomatisasi dan digitalisasi dalam industri ini.

Tahun 2025 menjadi titik penting bagi industri sawit dalam mengadopsi teknologi digital. Dengan aplikasi AKSI NYATA untuk kemitraan, teknologi Digital Twin untuk pemantauan lahan, perangkat inovatif dari Samsung Business Indonesia untuk efisiensi operasional, serta *drone* DJI Agras yang semakin cerdas, industri sawit semakin siap menghadapi tantangan global. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan produktivitas dan efisiensi, tetapi juga membuka jalan bagi keberlanjutan industri sawit di masa depan. (FGK)

Peningkatan Kapasitas Lembaga Pengelola Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR)

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) bertujuan meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui produktivitas sawit rakyat dan menyediakan *feedstock* untuk ketahanan pangan dan energi. Pada 2018, lebih dari 2 juta hektar sawit memasuki usia tua dan tidak produktif. Presiden Joko Widodo menargetkan PSR 180 ribu hektar per tahun, namun hingga 2023 rata-rata capaian hanya 30%. Pada 2024, target diturunkan menjadi 120 ribu hektar dengan realisasi 32%.

Sejak program PSR berjalan, pemerintah telah beberapa kali merevisi regulasi untuk tujuan percepatan. Namun, capaian tetap jauh dari harapan. Isu ini mendapat perhatian luas dari stakeholder sawit, meski belum ada upaya signifikan untuk mengatasi lambatnya proses pengusulan.

Berdasarkan hasil kajian IPOSS, ditemukan beberapa penyebab rendahnya capaian PSR: proses administrasi yang kompleks yang memakan waktu lama dan berbiaya tinggi, kelembagaan pekebun yang belum siap (secara pengetahuan administrasi, manajemen keuangan, dan perencanaan peremajaan); kesulitan pekebun dalam memenuhi legalitas lahan yang bebas kawasan hutan dan HGU; minimnya sosialisasi dan pendampingan yang optimal; serta kekhawatiran pekebun kehilangan sumber penghasilan akibat peremajaan.

Kelima faktor tersebut mencerminkan adanya hambatan internal dan eksternal pekebun yang membuat pengusulan PSR dari Lembaga pekebun jauh dari target yang diharapkan. Inti permasalahannya terletak pada aspek kelembagaan. Lembaga yang solid dengan pengurus kompeten dan pendanaan yang baik akan mampu mempercepat pemenuhan administrasi, termasuk legalitas lahan. Pengurus yang kompeten juga dapat memperlancar dan memastikan keakuratan proses pengusulan.

Namun, tidak semua pekebun memiliki lembaga yang baik dan memiliki kompetensi serta pendanaan yang memadai.

Padahal, keberadaan lembaga pekebun yang kuat terbukti menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program PSR. Contohnya Koperasi Unit Desa (KUD) Mulus Rahayu di Riau, yang telah berhasil meremajakan 310 hektar lahan sawit sejak tahun 2016 serta KUD Maju Jaya di Kabupaten Kampar Riau yang meremajakan 500 hektar lahan sawit rakyat.

Dengan dukungan melalui jalur perusahaan mitra dan/atau dinas. KUD-KUD ini mampu memberikan pendampingan teknis, akses terhadap bibit unggul, dan pengurusan surat pendukung legalitas lahan yang tepat waktu serta jaminan pasar bagi para anggotanya. Dalam waktu kurang dari tiga tahun, mereka sudah mulai memanen hasil pertama, yang menunjukkan efektivitas strategi peremajaan yang terstruktur dan sistematis.

Sayangnya tidak banyak lembaga seperti KUD Mulus Rahayu dan KUD Maju Jaya. Maka dari itu, jika ingin tercapai suksesnya PSR, maka kelembagaan petani perlu diperkuat melalui berbagai pelatihan, pendampingan dan program pendanaan kelembagaan. Sehingga proses pengusulan PSR dapat lebih cepat terealisasi.

Namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana jika proses penguatan kapasitas kelembagaan pekebun ini juga berjalan lambat? Tentunya dalam hal ini, perlu diingat kembali bahwa Program PSR bukan hanya soal meremajakan sawit milik rakyat, tetapi ini adalah program pemerintah yang juga bertujuan untuk menyediakan bahan baku biodiesel, bahan pangan dan bahan kimia untuk ketahanan bangsa Indonesia yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Maka, sudah saatnya negara hadir untuk meringankan beban pekebun dalam proses pengusulan PSR. Jika tidak demikian, maka negaralah yang harus bertindak secara langsung merencanakan, dan mengelola program PSR hingga berhasil baik dari sisi percepatan, kualitas agronomis maupun keberlanjutannya sebagaimana praktik *good agricultural practices* yang dilakukan Perusahaan Perkebunan. (MA)



Bibit kelapa sawit yang siap ditanam (dok. mmc Kalteng)

Strategi Meningkatkan Likuiditas Bursa CPO Indonesia



Peluncuran bursa CPO oleh Mendag 2022–2024, Zulkifli Hasan (dok. Kemendag)

Sebagai produsen *Crude Palm Oil* (CPO) terbesar di dunia, Indonesia berpeluang dalam menjadi referensi harga CPO global. Namun, kenyataannya, dalam penetapan harga referensi CPO, Kementerian Perdagangan masih mempertimbangkan harga dari bursa internasional seperti Bursa Malaysia Derivatives (BMD) dan Rotterdam. Ketergantungan ini tak terelakkan mengingat dinamika pasar luar negeri sangat mempengaruhi harga domestik karena rantai pasok yang terhubung antara Eropa (Rotterdam), Malaysia, dan Indonesia. Ketika harga CPO internasional jatuh, pasar domestik turut terdampak, menyebabkan harga TBS rendah dan merugikan pekebun sawit dalam negeri.

Untuk mengatasi ketergantungan ini, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan membentuk Bursa Fisik CPO Indonesia pada Oktober 2023 yang dikelola oleh ICDX dengan tujuan untuk menciptakan mekanisme pasar CPO dalam negeri, guna menciptakan referensi harga yang lebih transparan, adil, dan berbasis pasar domestik, serta mengurangi ketergantungan pada harga internasional.

Walaupun di Indonesia sudah beroperasi bursa berjangka sejak 2010, tetapi bursa berjangka hanya berfungsi sebagai alat lindung nilai (*hedging*), sehingga sebagian besar transaksi dilakukan dalam bentuk kontrak derivatif tanpa pengiriman barang secara fisik. Penyelesaian transaksi di bursa berjangka dilakukan secara tunai tanpa pengiriman CPO (*cash settlement*). Dengan tidak adanya transaksi riil, harga lebih mencerminkan ekspektasi pasar daripada kondisi pasar lokal. Inilah alasan bursa fisik CPO dibutuhkan.

Keberadaan bursa CPO ini memiliki berbagai tujuan strategis, namun belum mendapat dukungan penuh oleh pelaku pasar

CPO, khususnya oleh 52 anggota bursa. Hal ini terlihat dari transaksi perdagangan fisik CPO melalui bursa yang hanya terjadi sesaat setelah peresmian Bursa Fisik CPO Indonesia pada Oktober 2023 lalu, selanjutnya hingga saat ini tidak tercatat ada transaksi yang berlangsung. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan yang mendalam apa penyebabnya.

Salah satu tantangan utama agar bursa fisik CPO dapat lebih likuid yakni meningkatkan jumlah dan volume transaksi fisik CPO di lantai bursa. Maka, hal itu membutuhkan peran aktif pelaku usaha yakni anggota bursa untuk bertransaksi. Berdasarkan hasil penelitian, ada sejumlah aspek yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga tidak bertransaksi melalui bursa ICDX.

Aspek tersebut antara lain kurang memadainya platform bursa, instrumen perdagangan yang tidak fleksibel, belum adanya infrastruktur penyimpanan CPO, standarisasi dan kualitas CPO yang beragam, transparansi harga dan mekanisme kliring serta infrastruktur bursa berupa kemitraan strategis dengan bursa internasional.

Jadi, meskipun ICDX telah menambah titik serah menjadi 19 pelabuhan, menawarkan berbagai opsi sertifikasi produk, dan mengadakan diskusi publik. Namun, upaya ini belum cukup untuk menarik pelaku pasar agar beralih dari sistem kontrak langsung (*off-market*) ke bursa fisik CPO.

Menghadapi tantangan ini, Indonesia dapat belajar dari keberhasilan BMD mengelola bursa CPO di Malaysia. BMD mengembangkan instrumen perdagangan yang lebih fleksibel dengan regulasi yang mendukung, seperti adanya produk opsi (*options*) pada kontrak berjangkanya. Dengan adanya *options*, pelaku pasar memiliki fleksibilitas untuk memilih mengeksekusi kontrak melalui fisik (penyerahan barang) atau *settlement* keuangan sebelum jatuh tempo yang mana produk ini lebih sesuai dengan karakter produk CPO yang memiliki batas waktu penyimpanan, dan dapat lebih mudah menyesuaikan strategi perdagangan sesuai dengan dinamika pasar.

Agar produk *options* dapat diterapkan di Bursa CPO Indonesia, dukungan regulasi sangat dibutuhkan. Jika terwujud, likuiditas pasar akan meningkat, kredibilitas bursa menguat, dan harga yang terbentuk lebih diakui. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya akan menjadi produsen CPO terbesar di dunia tetapi juga memiliki kendali lebih besar atas harga CPO domestik serta memperkuat posisinya sebagai pemain utama dalam perdagangan minyak sawit global. (Dhp, DS)

Optimalisasi Tata Kelola UCO: Peluang Besar Indonesia dalam Energi Bersih



Ilustrasi penanganan Used Cooking Oil (UCO) (dok. Ai)

Minyak jelantah (*Used Cooking Oil* - UCO) adalah minyak goreng bekas yang tidak layak konsumsi tetapi dapat menjadi bahan baku *Sustainable Aviation Fuel* (SAF) dengan teknologi *Hydroprocessed Esters and Fatty Acids* (HEFA). Teknologi ini mampu mengubah minyak nabati atau lemak hewani, termasuk UCO, menjadi berbagai bahan bakar ramah lingkungan, seperti SAF, dengan emisi karbon lebih rendah dibandingkan bahan bakar fosil. Apabila tidak dimanfaatkan, UCO dapat mencemari lingkungan dan berisiko disalahgunakan sebagai minyak konsumsi ilegal. Sayangnya, meskipun kebutuhan tata kelola semakin mendesak, tetapi Indonesia belum memiliki regulasi komprehensif terkait pengumpulan dan pemanfaatan UCO.

Di pasar global, UCO bernilai tinggi sebagai bahan baku biodiesel dan SAF, dengan harga FOB ARA €1.010 per ton. Indonesia berpotensi menghasilkan 3-4 juta kiloliter UCO per tahun dengan pola konsumsi minyak goreng yang lebih sehat. Namun, saat ini hanya sekitar 900 ribu kiloliter yang dapat dikumpulkan, dengan 200-300 ribu kiloliter diekspor tiap tahun (BPS/Exim).

Rantai pasok UCO di Indonesia melibatkan rumah tangga, Horeka, dan industri makanan sebagai sumber utama, yang menyalurkan UCO ke pengepul sebelum diproses menjadi biodiesel atau produk lain. Namun, tanpa regulasi yang jelas, pengawasan lemah, efisiensi pengumpulan rendah, dan risiko penyalahgunaan tinggi. Akibatnya, potensi UCO dari Horeka, industri makanan dan rumah tangga belum dimanfaatkan secara optimal.

Indonesia dapat belajar dari negara lain yang telah berhasil membangun sistem pengelolaan UCO yang efisien dan transparan.



Malaysia melalui *Malaysian Palm Oil Board* (MPOB) memprioritaskan keterlacakan (*traceability*) di seluruh rantai pasok UCO untuk mencegah praktik ilegal. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor industri menjadi kunci keberhasilan. Misalnya, Petronas menyediakan fasilitas pengumpulan UCO di stasiun bahan bakar,

sementara industri lain, FatHopes Energy memastikan kepatuhan produsen terhadap standar keberlanjutan UCO yang dikumpulkan.



Jepang membangun sistem pengumpulan UCO dari berbagai sumber untuk memenuhi mandat minimal 10% SAF pada tahun 2030. Pemerintah Jepang memberikan subsidi kepada produsen biodiesel berbasis UCO. Selain itu, restoran yang menjual UCO secara ilegal dapat dikenai denda atau sanksi penutupan usaha, menciptakan insentif kuat untuk menjaga legalitas rantai pasok.



China mengambil langkah strategis dengan menghapus rabat pajak ekspor UCO sebesar 13% sejak Desember 2024, yang berhasil meningkatkan pasokan UCO domestik untuk biofuel. China juga menerapkan sistem penelusuran digital (*GPS tagging*) pada kendaraan pengangkut UCO di kota besar guna memperkuat transparansi dan mencegah penyalahgunaan.

Belajar dari praktik di negara tersebut, pemerintah Indonesia dapat segera membangun sistem tata kelola UCO yang komprehensif dan mendukung pengumpulan dari sektor Horeka, industri makanan dan rumah tangga secara optimal. Tata kelola harus mencakup regulasi standar pengumpulan, pelacakan berbasis teknologi, insentif dan sanksi tegas bagi pelanggar untuk memastikan legalitas dan akuntabilitas di sepanjang rantai pasok UCO.

Insentif fiskal dapat mendorong pelaku industri untuk mengumpulkan UCO dari berbagai sektor, termasuk rumah tangga yang selama ini kurang terakomodasi. Dan untuk mendukung prosesnya, kerjasama antara BUMN energi dan sektor swasta dapat dilakukan dengan membangun titik-titik pengumpulan di area publik, seperti stasiun bahan bakar atau pusat perbelanjaan, untuk mempermudah masyarakat mengumpulkan UCO.

Pemerintah juga dapat membatasi ekspor UCO dengan pungutan lebih besar untuk memastikan harga domestik lebih menarik dibandingkan ekspor, sehingga mendukung industri SAF dalam negeri. Dengan kebijakan yang tepat akan mendorong pelaku industri menjual UCO di dalam negeri daripada mengekspornya, sehingga pasokan dalam negeri tetap stabil.

Urgensi membangun tata kelola UCO yang baik di Indonesia tidak dapat diabaikan. Regulasi yang jelas, dukungan kesiapan teknologi, dan insentif yang tepat akan memungkinkan pengelolaan UCO secara optimal. Melalui upaya ini diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi UCO sebagai bagian dari transisi energi bersih. (DS)

Feedstock B50 Tahun 2026: Potensi dan Strategi Pemenuhan Kebutuhannya



Ilustrasi CPO (dok. Ai)

Pemerintah Indonesia menargetkan penggunaan biodiesel berbasis minyak sawit B50 pada 2026. Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM menyampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPR RI pada 18 Februari 2025 bahwa uji teknis B50 sedang berlangsung dan diperkirakan memakan waktu enam bulan.

Namun, keberhasilan B50 tidak hanya bergantung pada uji teknis, tetapi juga kesiapan berbagai faktor seperti kecukupan bahan baku, dana BPDP, kapasitas pabrik biodiesel, serta infrastruktur transportasi dan penyimpanan.

Kebutuhan CPO untuk B50 diperkirakan mencapai 17,9 juta ton pada 2026, meningkat 6 juta ton dibandingkan 2024. Untuk campuran ini, dibutuhkan sekitar 19,7 juta kL FAME, naik 26% dari B40 pada 2025 dan 36% dari B35 pada 2024. Tantangannya adalah apakah produksi CPO nasional sebesar 50 juta ton per tahun mampu mencukupi kebutuhan tersebut?

Beberapa opsi dapat dipertimbangkan, seperti pengurangan ekspor CPO, impor dari negara lain, ekspansi lahan sawit, atau peningkatan produktivitas melalui replanting.

Jika ekspor CPO dan turunannya dikurangi, dampaknya akan terasa pada devisa negara. Pada 2024, ekspor minyak sawit mencapai 29,5 juta ton. Jika 6 juta ton dialokasikan untuk B50, ekspor berkurang sekitar 20%, menurunkan penerimaan devisa sekitar 5,6 miliar USD atau Rp 90,1 triliun.

Alternatif lainnya adalah mengimpor CPO dari Malaysia atau Thailand. Namun, harga impor CPO lebih tinggi dibandingkan harga impor BBM solar dari Singapura, sehingga opsi ini kurang efisien.

Ekspansi lahan sawit juga menjadi pertimbangan. Untuk memenuhi tambahan kebutuhan 6 juta ton CPO, diperlukan sekitar 1,5 juta hektar lahan baru dengan asumsi produktivitas 4 ton/ha. Namun, butuh waktu setidaknya tujuh tahun

sebelum lahan baru dapat berproduksi optimal. Selain itu, ekspansi lahan berisiko memperburuk citra industri sawit terkait isu deforestasi dan lingkungan.

Opsi jangka panjang yang lebih berkelanjutan adalah peningkatan produktivitas melalui replanting. Strategi ini menjanjikan jika dilakukan secara konsisten. Namun, untuk mencapai target produksi yang lebih tinggi, diperlukan program peremajaan 600 ribu hektar per tahun, dengan 200 ribu hektar dari kebun rakyat dan sisanya dari perusahaan. Sayangnya, realisasi replanting masih jauh dari target, sehingga peningkatan produksi dalam waktu dekat sulit dicapai.

Solusi tercepat yang dapat dioptimalkan adalah penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP), seperti disiplin panen, perbaikan akses jalan, pencegahan pencurian, pemupukan yang tepat (5T), pengendalian hama terpadu, dan pemantauan produksi berbasis IoT. Peningkatan produksi melalui perbaikan GAP diperkirakan dapat mencapai 10-12% dari produksi saat ini.

Selain itu, untuk memaksimalkan hasil perbaikan GAP di Perusahaan, maka peran auditor ISPO dapat diperluas untuk menilai produktivitas pekebun, baik swasta, negara, maupun rakyat. ISPO tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan dan legalitas lahan, tetapi juga aspek ekonomi (produksi), di mana peningkatan produksi akan berdampak pada pendapatan pekebun.

Momentum iklim yang diperkirakan stabil pada 2025 tanpa dampak El Niño harus dimanfaatkan guna meningkatkan hasil panen dan produksi nasional. Dengan optimalisasi GAP dan strategi kebijakan yang tepat, target B50 pada 2026 diharapkan dapat tercapai. Pemerintah, industri, dan pemangku kepentingan perlu bekerja sama dalam mencari solusi terbaik guna memastikan keberlanjutan industri sawit, sehingga manfaat ekonomi dan lingkungan tetap seimbang. (Dhp)

Ketertelusuran Sawit: PR Besar Menuju EUDR



Ilustrasi ketertelusuran sawit oleh EUDR (dok. istimewa)

Penerapan Regulasi Deforestasi oleh Uni Eropa (EUDR) meningkatkan standar bagi tujuh komoditas, termasuk minyak sawit dan turunannya. Tidak seperti sertifikasi RSPO atau ISCC yang bersifat sukarela, EUDR wajib bagi eksportir dan importir yang ingin memasukkan produk ke pasar Uni Eropa (UE). Produk harus terbukti bebas deforestasi berdasarkan peta *Global Forest Watch* (GFW) dan definisi hutan FAO, yaitu lahan lebih dari 0,5 hektar dengan pohon lebih dari 5 meter dan tutupan kanopi lebih dari 10%.

EUDR mewajibkan uji tuntas (*due diligence*) untuk membuktikan bahwa suatu produk tidak berasal dari lahan yang mengalami deforestasi sejak Desember 2020 serta telah memenuhi regulasi negara asal. Proses ini membutuhkan sistem ketertelusuran (*traceability*) yang akurat. Tantangan utamanya adalah kesiapan Indonesia dalam menerapkan sistem tersebut agar minyak sawit dan produk turunannya tetap bisa diekspor ke UE.

Pada 2024, Indonesia meluncurkan Dasbor Nasional Komoditas (NDC) yang dikembangkan PT Surveyor Indonesia atas penugasan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk melacak asal-usul produk ekspor guna memenuhi persyaratan EUDR. Meski sistem ini menjadi langkah maju, implementasinya menghadapi kendala karena banyak perusahaan masih membutuhkan pasokan tambahan dari pekebun sawit rakyat.

Sayangnya, banyak pekebun sawit rakyat belum memiliki izin usaha budidaya atau Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB).

Data Kementerian Pertanian menunjukkan hanya sekitar 411 ribu hektar lahan sawit rakyat memiliki STDB, sekitar 7% dari total luas lahan sawit rakyat. Selain itu, sekitar 2 juta hektar lahan sawit rakyat masih berstatus dalam klaim kawasan hutan.

Proses pengurusan STDB seringkali terkendala faktor teknis dan biaya. Pekebun harus mengurus izin ini di Dinas Kabupaten, melakukan pengambilan koordinat kebun, serta menghadapi birokrasi yang kompleks. Jika hambatan administratif ini tidak segera diatasi, produksi Tandan Buah Segar (TBS) dari pekebun rakyat akan terpinggirkan dalam rantai pasok ekspor ke UE, berdampak pada mata pencaharian jutaan pekebun.

Keterlibatan pekebun rakyat dalam sistem administrasi dan sertifikasi sudah lama menjadi tantangan. Sejak dimulainya program sertifikasi ISPO pada 2011, hingga 2024, data Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa hanya kurang dari 1% luas lahan sawit rakyat yang sudah tersertifikasi ISPO. Sementara itu, menurut penelitian INDEF, hanya 6% petani sawit mengetahui keberadaan regulasi EUDR. Dengan pekebun rakyat mengelola sekitar 42% dari total luas lahan sawit nasional, minimnya kesadaran mereka terhadap regulasi ini berpotensi menghambat ekspor sawit Indonesia ke UE.

Disisilain, beberapa eksportir telah berhasil mengintegrasikan data mereka ke dalam sistem NDC dan memenuhi standar EUDR. Ini menunjukkan bahwa sistem ketertelusuran nasional dapat diterapkan secara efektif, meskipun masih memerlukan percepatan dan dukungan yang lebih luas dari pemerintah, industri, serta pekebun.

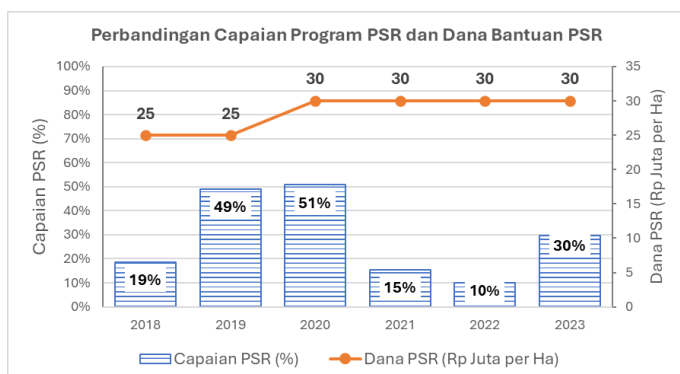
Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah perlu mempercepat sertifikasi ISPO serta penerbitan STDB bagi pekebun sawit rakyat. Rendahnya tingkat sertifikasi menunjukkan bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan lebih besar, baik dalam bentuk penyederhanaan prosedur administrasi, subsidi biaya sertifikasi, maupun pendampingan teknis agar mereka dapat memenuhi legalitas lahan dan izin usaha dalam rangka memenuhi EUDR.

Dengan peningkatan sistem ketertelusuran dan dukungan yang lebih baik bagi pekebun sawit, Indonesia memiliki peluang besar memperkuat posisinya dalam rantai pasok minyak sawit global. Pengintegrasian sistem ketertelusuran yang lebih luas dan inklusif harus terus dilakukan agar produk minyak sawit Indonesia tetap dapat bersaing di pasar Eropa dan memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh EUDR. (RFY)

Bukan Sekadar Dana: Apa yang Menghambat Program PSR?

Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) merupakan strategi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun melalui peningkatan produktivitas dan keberlanjutan perkebunan sawit rakyat. Walaupun ekspektasi dari program ini sangat baik, namun realitanya capaian luas PSR masih sedikit. Belum semua lahan kelapa sawit tua dan tidak produktif masuk dalam program PSR. Padahal pemerintah telah menyediakan dana bantuan PSR melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang cukup besar. Akibatnya alokasi dana yang disediakan tidak terserap seluruhnya.

Sebagaimana diketahui, sejak diluncurkan pada tahun 2016, pemerintah telah menetapkan dana bantuan PSR yang diberikan sebesar Rp 25 juta per hektar. Kemudian pada tahun 2020, dana bantuan dinaikkan menjadi Rp 30 juta per hektar dengan harapan dapat mendorong percepatan PSR. Namun, apakah benar peningkatan dana ini mampu mendorong capaian luas program PSR? Untuk itu dalam tulisan ini akan coba diulas bagaimana pengaruh dana bantuan PSR terhadap peningkatan capaian program PSR.



Berdasarkan data pada grafik di atas, dapat dilihat data capaian program PSR yakni rasio luas realisasi PSR terhadap target, dan dana bantuan PSR. Setelah dilakukan analisa ternyata, tidak terbukti korelasi yang signifikan antara peningkatan dana bantuan PSR dari Rp 25 juta menjadi Rp 30 juta per hektar terhadap capaian program PSR. Justru yang terjadi, sejak dana bantuan PSR dinaikkan menjadi Rp 30 juta per hektar, capaian PSR mengalami penurunan. Lantas, sebenarnya di mana letak lambannya capaian PSR, jika ternyata kenaikan dana bantuan tidak mendorong peningkatan realisasi luas PSR.

Berdasarkan kajian IPOSS, terungkap bahwa faktor kelembagaan menjadi kunci utama lambatnya program PSR. Kelembagaan yang solid dan kompeten menjadi kunci



keberhasilan program ini. Sebab, serumit apapun regulasi yang ada, asalkan Lembaga pekebun dikelola oleh SDM yang kompeten dan profesional maka proses pengusulan dapat dilalui hingga selesai tepat waktu.

Memang betul, di sisi lain ada persoalan legalitas lahan yang rumit karena harus berurusan dengan instansi lain seperti Kantor Pertanahan Kabupaten (Kantah BPN) dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi. Meskipun urusan seperti ini cukup sulit mengingat keterbatasan SDM di masing-masing instansi tersebut, namun apabila diurus oleh pengurus lembaga pekebun yang profesional, maka hasilnya akan cepat terealisasi.

Untuk mengatasi tantangan kelembagaan, perlu dilakukan langkah-langkah tertentu oleh pemerintah dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan pekebun. Diperkirakan, untuk memenuhi target 180 ribu hektar PSR per tahun, dibutuhkan keterlibatan sekitar 70 ribu s.d 90 ribu pekebun dengan jumlah kelembagaan sekitar 1.000 - 3.600 lembaga. Tentunya, semua lembaga pekebun tersebut harus didorong peningkatan kapasitasnya baik dari aspek kompetensi, standarisasi kelembagaan, *best management practice* agronomi, hingga pendanaan. Tanpa peningkatan kapasitas, maka sulit memastikan proses pengusulan PSR dapat dilakukan secara cepat, tepat dan bertanggungjawab.

Untuk itu, walaupun bantuan PSR telah ditingkatkan sejak September 2024 menjadi Rp 60 juta per hektar namun jika tanpa penguatan kelembagaan pekebun, maka percepatan PSR akan sulit terealisasi. Perlu upaya sistematis pemerintah dalam memberikan pelatihan, pendampingan dan supervisi pada pekebun agar tercapai percepatan PSR dengan kualitas hasil seperti yang diharapkan. (SN)